

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar
- A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Kencana, Jakarta
- Abdul Hafid, 2014, *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo*, Makassar: Pustaka Refleksi
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Ahda Mulyati, Muhammad Najib, and Nur Rahmanina Burhany, 2017, *“Pengetahuan Lokal Berbasis Mitigasi Bencana Pada Pembentukan Permukiman ‘Orang Bajo’ di Perairan Sulawesi Tengah,”*
- Aminuddin Salle et al, 2010, *Hukum Agraria*, A.S. Publishing, Makassar
- Aminuddin Salle. Abrar Saleng. A. Suriyaman A. Mustari Pide. Farida Patittingi. Sri Susyanti Nur. Kahar Lahae. 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. AS Publishing. Makassar
- AP Parliungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Diindonesia* (PP No.24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan PP No.37 Tahun 1998, CV. Mandar Maju, Bandung
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Djambatan
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbitan Djambatan. Jakarta

- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, St. Paul: West Publishing
- Chomzah, Ali Achmad, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dahuri, Rokhmin, et.al., 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Farida Patittinggi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Penerbit Rangkang Education. Yogyakarta
- Farida Patittinggi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Penerbit Rangkang Education. Yogyakarta
- Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo 2000, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irwansyah, editor Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Imam Soetiknjo. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford
- John Rowls. 2006. *A Theori of Justice*. Teori Keadilan. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Lubis, Mhd. Yamin & Lubis, Abd. Rahim, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mondar Maju, Bandung
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta

- Martono, N. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Edisi Revisi). Rajawali Press. Jakarta. 2014,
- Mhd. Yamin Lubis, Abd Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*. Penerbit Citra Media. Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Qurthubi, Al Imam, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Tafsir Al-Qurtubi), Juz 1, Pustaka Azzaro, 2007. Hlm 130.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rokhmin Dahuri, 2004, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita
- Satjipto Rahardjo. 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Soekanto, S. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. hlm. 404
- Sri Susyanti Nur, 2010, *Bank Tanah*, As Publishing, Makassar
- Sri Susyanti Nur, 2010, *Urgensi Bank Tanah*, Pustaka Pena Press, Makassar

- Sri Susyanti Nur, 2015, "*Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun oleh Suku Bajo*," Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK
- Sudirman Saad, 2013, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Sudirman Saad. 2009. *Bajo Berumah di Laut Nusantara*, COREMAP II, Jakarta
- Sugeng Budiharsono, 2005, *Tehnik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sumardi, Djoni Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah*, UII Press, Yogyakarta 2018,
- Thomas Nagel, 2005, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Von Thomas Aquinas dalam Marwan Mas, 2004, "*Pengantar Ilmu Hukum*"Ghalia Indonesia, Bogor
- Widhi Handoko, 2014, *Regulasi Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Jogjakarta.
- Yuga, Surya (Ed.). Jagad Bahari Nusantara: Telaah Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Pantai, Melestarikan Budaya Bahari dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2011.

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perikanan dan Kelautan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Tentang No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 - 2032

Jurnal

Arwanto, Daffa Syadayaga dkk. *Pemetaan Kesesuaian Lahan Kawasan Permukiman di Sekitar Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Menggunakan Sistem Geografis*. (study kasus : Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan), Jurnal Geodesi Undip, Vol 13. No. 3, 2024.

Banser, Wiranti Ngaul, dkk, *Dampak Kepemilikan Pesisir Laut yang dijadikan Objek Wisata*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 4, Tahun 2024

Dewa Gede Atmaja, *“Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum Vol. 15 No. 1 Mei 2015, hlm. 31-32, diakses dari <https://disperkim.samarindakota.go.id/asset/filelib/ads/22-34-1-PB.pdf> pada 31 Januari 2024 Rokhmin Dahuri, 2004, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

- Lisa Meidiyanti Lautetu, dkk, *Karakteristik Permukiman Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Bunaken, Jurnal Spasial* Vol 6. No. 1, 2019
- Muhammad Taufik (2013) "Filsafat John Rawls *Tentang Teori Keadilan*", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1,
- Jawahir Thontowi, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia," JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2013
- Joyo Winoto. "Kuliah Umum Kepala Badan Pertanahan Nasional RI". Universitas Hasanuddin. Makassar. 19 Ssseptesmberr 2011 dalam jurnal Farida Patittinggi, *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*.
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C., *Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019, hlm. 150-162
- Nurul Fajri Chikmawati, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)", Adil: Jurnal Hukum, Vol. 4 No.2., 2019
- Nurjannah St, *Redefinisi Terhadap Pengaturan Hak Milik Atas Tanah*, Jurisprudensi Vol.3 No.2 Desember 2016,
- Safrin Salam, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Bermukim Suku Bajo di Indonesia, Salah Satu Bentuk Implementasi Hak Asasi*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024,
- Sukirno, *Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39.
- Wardi Liza., Sushanti R. Ima., dan Widayanti H. B., (2014). *Karakteristik dan Perubahan Pola Permukiman Nelayan Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan Kota Mataram*. Jurnal Penelitian. Universitas Muhammadiyah Mataram. Nusa Tenggara Barat.

Lain-Lain

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 01 Juli 2024

<https://hukumproperti.com/hak-atas-tanah-pada-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/> diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/7864/pdf> diakses 26 Juli 2024.

<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/7864/pdf> diakses pada 26 Juli 2024.

<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/7864/pdf>

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/01/31/29a40174e02f20a7a31b5bc3/statistik-demografi-indonesia--hasil-sensus-penduduk-2020-.html>. Diakses pada tanggal 3 november

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bajau, di akses pada tanggal 3 November 2024

<https://hukumproperti.com/hak-atas-tanah-pada-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025. Diakses 26 Juli 2024

<http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Nui, Teori Keadilan Adam Smith, Diakses pada Tanggal 01 Juli 2024

Andrek Tuanak, *Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam Peristilahan*, <https://www.kompasiana.com/andreratuanak/5d5319d90d82303d914e7732/tidak-semuamasyarakat-adat-adalah-masyarakat-hukum-adat-ambigu-dalam-peristilahan?page=2>,

Nurhasan Ismail, dalam Baritim Perjuangan Sinaga, *"Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum"*, <https://osf.io/preprints/xnpy6>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.

Sakuntalla, Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls), <http://alisafaat.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 01 Juli 2024

Suparma A. Diraputra, 2001, *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Bogor: PKSPL IPB. Dikutip dalam Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, Tanpa Tahun,

Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai, Makalah

Tesishukum, Perlindungan Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 31 Januari 2024

Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 01 Julil 2024

Eman Ramelan, "*Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999*", *Majalah YURIDIKA*, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Mei-Juni 2000.

Suparma A. Diraputra, 2001, *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Bogor: PKSPL IPB. Dikutip dalam Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, Tanpa Tahun, Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai, Makalah.